

**LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT**



**PEMBINAAN PENGEMBANGAN POTENSI WISATA DESA SURAU
KECAMATAN TABA PENANJUNG KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

Oleh :

1. Dr. Desi Isnaini, MA.
2. Miko Polindi, M.E.
3. Oktaviani

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa Selebar Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faximile (0736) 51171

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT TUGAS PENGABDIAN

Nomor: 0550/Un.23/L.I.2/07/2024

Berdasarkan permohonan Mahasiswa pada Tanggal 22 Juli 2024 perihal permohonan surat tugas PkM, maka yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menugaskan:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Dosen Pembimbing I | : Dr. Desi Isnaini, M.A. |
| NIP | : 197412022006042001 |
| Pangkat/Gol | : Lektor (IV/d) |
| Unit Organisasi | : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu |
| 2. Dosen Pembimbing II | : Miko Polindi, M.E. |
| NIP | : 199105252020121006 |
| Pangkat/ Gol | : Penata Muda Tingkat I (III.b) |
| Unit Organisasi | : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu |
| 3. Nama Mahasiswa | : Oktaviani |
| NIM | : 2011130137 |
| PRODI | : Ekonomi Syariah |

Untuk melaksanakan Pengabdian Kemasyarakatan berbasis penelitian dengan judul "Pengembangan Potensi Wisata Desa Surau Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah" pada tanggal 1 Juni s.d 10 Agustus 2024 dengan pendanaan sendiri sebesar Rp. 1.025.000,-.

Demikian surat tugas Pengabdian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan pariwisata menjadi pilihan di banyak negara hingga pilihan yang bersifat lokal, karena dapat menjadi faktor pendorong peningkatan pendapatan. Sumber daya yang ditawarkan juga sangat bervariasi bahkan dapat disegmentasikan pada sasaran pasar yang sempit. Pengembangan pariwisata yang berdampak besar pada masyarakat, dapat dibangun dengan cara mengaitkan dengan keberadaan masyarakat setempat. Pola pengembangannya biasanya menggunakan model pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan kawasan tersebut (*territory*).¹

Pengembangan kepariwisataan dapat membawa banyak manfaat dan keuntungan. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menyaingi kegiatan ekonomi lainnya, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait. Upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan nasional untuk meningkatkan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa. Mengingat luasnya kegiatan yang harus dilakukan untuk mengembangkan kepariwisataan, maka perlu dukungan dan peran serta yang aktif dari masyarakat.²

Pengembangan dampak pariwisata ini akan berdampak sangat luas dan signifikan dalam pengembangan ekonomi upaya-upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta akan berdampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat terutama masyarakat lokal. Pengembangan kawasan wisata mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, membuka peluang usaha dan kesempatan kerja serta sekaligus berfungsi menjaga kelestarian kekayaan alam dan hayati. Pengembangan pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan

¹ Anang Muftiadi, ‘Pengembangan Desa Wisata dan Potensinya di Kabupaten Pangandaran’, Jurnal AdBispreneur, 2.2, 117-124, (h.118)

² Itah Masitah, Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran’, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 6.3, 45-56 , (h.46)

secara umum menjadi relevan jika pengembangan pariwisata itu sesuai dengan potensi daerah.³

Desa memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata, yakni potensi alam, potensi sumber daya manusia maupun potensi budaya. Pengembangan wisata perdesaan merupakan salah satu inovasi masyarakat dalam menangkap peluang dan potensi wisata di desa. desa wisata merupakan kawasan perdesaan yang menawarkan berbagai kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang memiliki potensi untuk dikembangkan berbagai komponen wisata. Sejalan dengan dinamika perkembangan pariwisata saat ini, bahwa kegiatan pariwisata tidak hanya terpusat di kota-kota besar namun sudah merambah ke wilayah pedesaan, terbukti dengan banyaknya desa-desa yang sudah berhasil mengembangkan potensi wisatanya yang dikelola dengan baik sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli desa dari sektor tersebut. pengembangan desa wisata dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan bagi desa dan masyarakatnya, sehingga jika peluang ini dapat ditangkap oleh pemerintah desa dan masyarakatnya, maka berdampak pada peningkatan ekonomi dengan pengembangan desa wisata tersebut. Di samping itu pengembangan desa wisata hendaknya dapat menjaga kelestarian budaya masyarakat pedesaan melalui keterlibatan masyarakat sebagai pelaku kegiatan pariwisata di desanya.⁴ Pengembangan potensi desa bertujuan untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat desa melalui pengembangan potensi unggulan desa, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

Desa wisata mempunyai dampak bagi ekonomi suatu wilayah, antara lain pemerataan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan pendapatan daerah. Sebagaimana termuat dalam Presiden Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwistaan” (2009), bahwa keadaan alam, flora, dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki

³ Dadan Mukshin,’ Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung (Studi Kasus Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya)’, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 14.1, 1-14, (h.2)

⁴ Lilyk Eka Suranny, ‘Pengembangan Potensi Desa Wisata Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perdesaan di Kabupaten Wonogiri’ Jurnal Litbang Sukowati,5.1(2021), 2614-3356 (h. 50)

bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal. Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi.⁵

B. Tujuan Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, berikut adalah tujuan pengabdian masyarakat yang dapat dirumuskan untuk pengembangan unit bisnis syariah di Desa Surau Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah:

1. Untuk mengetahui apa saja keunggulan dari aset-aset yang dimiliki oleh Desa Surau Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Untuk mengetahui strategi yang efektif untuk mengembangkan bisnis syariah yang berkelanjutan di Desa Surau Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Untuk mengetahui hasil yang dicapai dari proses pelaksanaan strategi yang dilakukan untuk mengembangkan bisnis syariah yang berkelanjutan di Desa Surau Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, diharapkan Desa Surau Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dapat menjadi pusat pengembangan

⁵ Bagus Sudibya, ‘Wisata Desa dan Desa Wisata’, Jurnal Bappeda Litbang,1.1 (2018), 2615-0956 (h.23)

ekonomi syariah yang berkelanjutan dan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

C. Fokus Pengabdian

1. keunggulan dari aset-aset yang dimiliki oleh Desa Surau Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemilihan strategi yang efektif untuk mengembangkan bisnis syariah yang berkelanjutan di Desa Surau Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Analisis hasil yang dicapai dari proses pelaksanaan strategi yang dilakukan untuk mengembangkan bisnis syariah yang berkelanjutan di Desa Surau Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

D. Metodelogi Pengabdian

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan metode *Asset Based Community Development* (ABCD). ABCD dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh John McKnight dan Jody Kretzmann yang juga pendiri dari *The Asset-Based Community Development (ABCD) Institute*. Pendekatan berbasis aset membantu komunitas melihat kenyataan kondisi internal dan kemungkinan perubahan yang dapat dilakukan. Pendekatan ini mengarahkan pada perubahan, dan fokus pada apa yang ingin dicapai oleh komunitas, serta membantu komunitas dalam mewujudkan visi mereka⁶. McKnight dan Kretzmann (1993) mengemukakan ada 6 (enam) prinsip yang perlu dipegang oleh para *local enabler* (pemberdaya masyarakat lokal) demi terciptanya pemberdayaan yang berkelanjutan, yakni (1) apresiasi, (2) partisipasi, (3) psikologi positif, (4) deviasi positif, (5) pembangunan dari

⁶ Christoper Dereau, *Pembaruan dan Kekuatan Lokal untuk Pembangunan*, (Australia: Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II, 2013), hlm.3

dalam, dan (6) hipotesis heliotropik. Keenam prinsip ini kemudian diwujudkan dalam tahapan kegiatan pengabdian oleh para *local enabler*⁷.

Adapun aset yang dimaksud dalam pengabdian ini adalah aset ekonomi, aset lingkungan, aset fisik, aset non fisik, dan aset sosial. Artinya, makna pemilikan aset dalam hal ini sangat luas, tidak terbatas pada kepemilikan aset fisik, aset dimaknai sebagai segala sesuatu yang berharga, bernilai sebagai kekayaan atau potensi yang memiliki kemungkinan mendatangkan manfaat atau kekayaan. Dalam implementasi metode ABCD kedatangan fasilitator pada komunitas mereka tidak hanya sekedar sebagai pengamat yang melihat keseharian komunitas, akan tetapi ikut berperan penting dalam mendorong kemandirian komunitas untuk meningkatkan kualitas lembaga/organisasi.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada pelaporan ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN, yang memuat: Latar Belakang, Tujuan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, Fokus Pengabdian, Metodologi Pengabdian, dan Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN TEORIA dan BAB III PELAKSANAAN PKM, yang memuat tentang Gambaran Umum Lokasi Pengabdian (bisa dibuat sub-sub, seperti sejarah, visi, misi, struktur organisasi), Gambaran Kegiatan yang terdiri dari: Persiapan/Perencanaan Kegiatan Rencana Anggaran Biaya, Hasil PkM (buat sub-sub sesuai yg dilaksanakan dan tahapan dalam Metode yg digunakan, dan beri beberapa foto kegiatan

DAFTAR PUSTAKA

⁷ Ibid. Hal 131

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pariwisata

Pengertian pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing di dalam atau di luar suatu negara, kota, atau wilayah tertentu. Menurut definisi yang lebih luas yang dikemukakan oleh Kodhyat pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilaksanakan untuk sementara waktu, yang dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menikmati perjalanan bertamasya dan berekreasi.⁸

Banyak negara bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh Organisasi Non-Pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal.

Pariwisata adalah salah satu sektor yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi, salah satunya adalah membuka lapangan pekerjaan serta membangun ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan industri-industri kreatif. Pemerintah Kota Bengkulu memiliki peran yang sangat besar dalam mengembangkan objek wisata yang ada di Kota Bengkulu sehingga objek wisata di Kota Bengkulu menjadi tujuan wisata unggulan di Indonesia.⁹

Dalam sistem pariwisata, ada banyak faktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada

⁸ Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, Riyanto, ‘Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk)’ Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1.4, 135-143 (h. 137)

⁹ Hendra Felani , Teddy Surya Rahmadi, ‘Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat di Lokasi Wisata Pantai Jakat Kota Bengkulu’, Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 14.1 (2022) 21-35 (h.22)

berbagai sektor. Secara umum, pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu:

1. Masyarakat, yang termasuk masyarakat adalah masyarakat umum yang ada pada destinasi, sebagai pemilik dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata, seperti kebudayaan. Termasuk ke dalam kelompok masyarakat ini juga tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, LSM, dan media massa.
2. Swasta, dalam kelompok swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha,
3. Pemerintah, sedangkan kelompok pemerintah adalah berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya.¹⁰

Menurut undang-undang No.10/2009 Tentang Kepariwisataaan, yang dimaksud dengan Pariwisata : “*Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah*”.

B. Potensi Wisata

Sebuah destinasi wisata wajib memiliki potensi pariwisata. Potensi inilah yang akan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang atau berkunjung ke suatu destinasi pariwisata. Pengertian potensi dikemukakan oleh J.S Badudu sebagai suatu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan daya. Sedangkan pengertian untuk potensi pariwisata itu sendiri salah satunya dikemukakan oleh R.S Damardjati yang mendefinisikan potensi pariwisata sebagai segala hal dan keadaan baik yang nyata atupun dapat diraba, maupun yang tidak dapat diraba, yang digarap, atur, disediakan sedemikian rupa sehingga bermanfaat atau dimanfaatkan atau diwujudkan sebagai kemampuan, faktor dan unsur yang diperlukan atau menentukan bagi usaha dan

¹⁰ Deddy Prasetya Maha Rani, ‘Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang)’ Jurnal Politik Muda, 3.3, (2014), 412-421(hal. 415)

pengembangan kepariwisataan, baik itu berupa suasana, kejadian, benda maupun layanan atau jasa.¹¹

Didasarkan pada definisi potensi pariwisata di atas, yang dimaksud dengan potensi pariwisata pada tulisan ini yaitu segala hal dan keadaan baik yang nyata atau dapat diraba, maupun yang tidak dapat diraba yang dimiliki oleh Desa Wisata Surau yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan sebagai kemampuan, faktor pendukung dan unsur yang diperlukan dalam pengemasan Paket Wisata Pedesaan berbasis masyarakat lokal. Adapun potensi dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu alam, budaya, hasil karya buatan manusia baik yang berwujud fisik (berwujud) maupun non fisik (tidak berwujud).

C. Desa Wisata

Desa wisata merupakan salah satu objek wisata yang sedang berkembang pada sektor pariwisata. Desa wisata biasanya dikembangkan pada kawasan pedesaan yang didalamnya masih memiliki karakteristik khusus. Karakteristik yang dimiliki pada desa wisata adalah sumber daya alam yang masih asli, keunikan desa, tradisi dan budaya masyarakat lokal. Berbagai karakteristik tersebut menjadi identitas suatu desa wisata yang memiliki kegiatan wisata minat khusus. Selain itu, desa wisata secara tidak langsung dapat mendorong masyarakat lokal untuk menjaga dan melestarikan alam serta kebudayaan yang telah dimiliki desa tersebut.¹²

Wisata pedesaan yang berbasis potensi alam, pertanian, sosial dan budaya lokal bisa menjadi pengembangan potensi masyarakat berbasis wisata . Daya tarik dan keunikan suatu desa dengan alam pedesaan yang dikelola, dikemas dengan menarik serta pengembangan fasilitas pendukung wisata ditata dalam satu lingkungan yang harmonis. Pengembangan desa wisata dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan tambahan bagi desa dan masyarakat¹³

¹¹ Ni Gusti Ayu Susrami Dewi, 'Paket Wisata Pedesaan "Become Pangsanian"di Desa Wisata Pangsan, Petang, Bandung', Analisis Pariwisata,16.1 (2016), 35-519 (h.31)

¹² Itah Masitah, 'Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran', Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 6.3,(2019), 2614-2945 (hal.46)

¹³ Wisma soerdomaji, abdul wahid, 'Pendampinan Pengembangan Wisata Desa Belarang kecamatan tutur kabupaten Pasuruan, 1.2 (2021), 72-78, (hal. 73)

Desa wisata merupakan bentuk penerapan pembangunan pariwisata yang berbasis pada potensi pedesaan dengan keunikan serta daya tarik yang dimiliki sertadapat dikembangkan sebagai suatu wisata untuk menarik kunjungan wisatawan. Desa wisata dapat diwujudkan dengan partisipasi masyarakat lokal yang memiliki peran penting dalam pengembangannya.

Masyarakat lokal merupakan pelaku penting dalam kegiatan perencanaan, pengawasan dan implementasi untuk pengembangan wisata serta sebagai tuan rumah bagi wisatawan. Pengembangan desa wisata lebih menitikberatkan pada suatu proses yang ditempuh ketika mengembangkan atau memajukan desa wisata. Proses dilakukan untuk memuaskan minat wisatawan yang ingin berkunjung dengan memperbaiki atau meningkatkan kualitas dari fasilitas wisata.Faktor dari suatu keberhasilan dalam pengembangan desa wisata berasal dari dukungan internal dan peran serta masyarakat lokal, sehingga diharapkan semua pihak yang menjadi faktor keberhasilan dapat mendukung untuk keberlangsungan ekonomi yang maju dan mensejahterakan seluruh pihak yang terlibat.¹⁴

Desa wisata merupakan sebuah konsep pengembangan daerah yang menjadikan desa sebagai destinasi wisata. Pengelolaan seluruh daya tarik wisata yang tepat diharapkan dapat memberdayakan masyarakat desa itu sendiri. Sesuai dengan prinsip utama dalam desa wisata, yaitu desa membangun. Prinsip ini berfokus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif sesuai dengan potensi dan sumber daya lokal.

Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Ditegaskan pula bahwa komponen terpenting dalam desa wisata, adalah:

1. Akomodasi, yakni sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau/ unit-unit yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal penduduk, dan

¹⁴ Kusuma Wardhani Masudah, Zainal Abidin Achmad, Widiana KhurniaPermatasari, Devita Andriani,Anugrah Akbar Fitra Putra Adianti,Hasri Maghfirotun Nisa, ‘Efektivitas Komunikasi Penyuluhan Pengembangan Desa Wisata Melalui Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Berbasis Sapta Pesona’ 1.2, (2022) 145-151 (hal.145)

2. Atraksi, yakni seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta latar fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif, seperti kursus tari, bahasa, lukis, dan hal-hal lain yang spesifik.¹⁵

Desa wisata pada dasarnya merupakan salah satu alternatif untuk mengakomodasi kebutuhan wisatawan yang memiliki minat khusus, dan sesungguhnya selama ini desa wisata telah banyak diminati wisatawan yang sebagian besar tinggal di daerah perkotaan. Banyak daya tarik wisata yang terdapat di kawasan pedesaan yang memiliki kekuatan untuk mendatangkan wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara. Potensi kawasan pedesaan yang berupa pemandangan alam pedesaan, peninggalan sejarah dan budaya serta berbagai kesenian dan kerajinan rakyat selama ini telah menarik minat wisatawan. Demikian pula berbagai kekayaan budaya masyarakat pedesaan seperti adapt istiadat dan pola kehidupan tradisional dapat dikemas menjadi produk wisata yang dapat ditawarkan kepada wisatawan.

Adapun unsur-unsur dari desa wisata antara lain:

1. Memiliki potensi pariwisata, seni dan budaya khas daerah setempat;
2. Lokasi desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata atau setidaknya berada dalam koridor dan rute perjalanan wisata yang sudah dijual;
3. Diutamakan sudah tersedia tenaga pengelola, pelatihan dan pelaku-pelaku pariwisata yang sudah dijual
4. Aksesibilitas dan infrastruktur mendukung program desa wisata;
5. Terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan

Dalam membangun desa wisata, terdapat 3 komponen yang perlu diperhatikan, diantaranya sebagai berikut.

1. Kondisi desa

¹⁵ Ade Jafar Sidiq, Risna Resnawaty, ‘Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggarjatu Kuningan, Jawa Barat’ PROSIDING KS: RISET & PKM, 4.1,1-140, (hal. 39)

Untuk mengetahui potensi wisata, pihak desa perlu memiliki basis data yang jelas mengenai kondisi desa dan bagaimana ekosistem yang dapat mendukung lokasi wisata nantinya.

2. Keadaan masyarakat dan struktur organisasi

Dalam pengembangannya, desa wisata diharapkan dapat dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri. Penyusunan organisasi untuk mengelola desa wisata dan kesiapan masyarakat dalam mengelola desa sangat diperlukan agar desa wisata dapat berkembang dengan optimal

3. Konsep desa wisata yang unik

Konsep desa wisata yang unik akan memberikan penilaian yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain.

Desa wisata memiliki beberapa tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut¹⁶ :

- a. Mendukung program pemerintah dalam program kepariwisataan dengan penyediaan program alternatif.
- b. Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat desa setempat.
- c. Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha bagi penduduk.

Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal. Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi.¹⁷

¹⁶ Priasukmana, Soetarso dan R. Mohammad Mulyadin, ' Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah, Info Sosial Ekonomi. 2001; 2 (1) : 37-44.

¹⁷ Made Heny Urmila Dewi, chafid fandeli, M. Baiquni, 'Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali, 3.2,(213), 117-226, (hal. 132)

Pengembangan desa wisata akan mendorong ekonomi produktif yang dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Pariwisata diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan dengan demikian secara tidak langsung menjamin keberlanjutan kegiatan pariwisata dalam jangka panjang sebagai bagian dari pengembangan ekonomi lokal dan regional masyarakat kontemporer dan masa depan. Selain itu, pariwisata juga dapat menjadi katalisator untuk mempromosikan keterkaitan kotadesa, mempromosikan transformasi pedesaan dari desa miskin menjadi desa berkembang, dan kemudian menjadi desa mandiri.

Dalam merintis dan mengembangkan desa wisata, diperlukan komitmen yang kuat dari masyarakat. Untuk itu, disepakati untuk menjalani semua prosesnya agar dapat belajar dari keberhasilan dan kesalahan, serta tidak mudah menyerah. Terakhir, disepakati bahwa dalam membangun pariwisata haruslah disertai rasa cukup. Perputaran uang yang diperkirakan dibawa masuk wisatawan akan dijadikan sebagai bonus pendapatan saja. Dengan begitu, dapat membatasi diri agar tidak terlalu rakus dalam mengeksplorasi alam dan mengejar keuntungan ekonomi.¹⁸

Secara ringkas pengembangan Desa Surau sebagai desa wisata berkelanjutan meliputi: Pembangunan daya tarik destinasi wisata; Peningkatan penyediaan fasilitas umum dasar; Peningkatan kemudahan dan ketersediaan informasi; Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan Desa Wisata.¹⁹

Konsep desa wisata berkelanjutan sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan ekonomi syariah, yang menekankan perlunya mengelola sumber daya alam dan ekonomi dengan bijak untuk memastikan kelangsungan hidup generasi mendatang.

Daya tarik desa wisata pasti akan menarik wisatawan untuk mengunjungi desa tersebut. Hal tersebut harus beriringan dengan upaya pengembangan desa wisata sebagai langkah agar desa wisata semakin digemari. Menurut Kementerian

¹⁸ Nurhayati Darubekti, Sri Handayani Hanum , ‘Partisipan dan Pengembangan Desa Surau sebagai Desa Wisata untuk peningkatan kapasitas daya saing lokal dalam aktivitas perekonomian’, Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI (2022),155-160 (h..159)

¹⁹ Sri Handayani Hanum, Nurhayati Darubekti, Hajar G. Pramudyasmono, Panji Suminar ,Sumarto Widiono, ‘Pengembangan Desa Surau Sebagai Desa Wisata Berkelanjutan’, jurmas Sosial dan Humaniora, 3.3 (2022), 442-446 (h.443)

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, terdapat 4 tahapan dalam pengembangan desa wisata²⁰

1. Tahap rintisan

Pada tahap ini, desa memiliki potensi yang besar namun belum ada kunjungan wisatawan. Selain itu, sarana dan prasarana masih sangat terbatas serta tingkat kesadaran masyarakat belum tumbuh. Desa wisata ini perlu “dikembangkan” dari awal.

2. Tahap berkembang

Pada tahap ini, potensi desa mulai dilirik oleh wisatawan dan destinasi bisa dikembangkan lebih jauh. Beberapa desa wisata di Indonesia biasanya sudah dikunjungi wisatawan tetapi belum dikelola dengan baik karena belum ada kesadaran kelompok.

3. Tahap maju

Pada tahap ini masyarakatnya sudah mulai sadar wisata, dana desa dipakai untuk mengembangkan potensi pariwisata, memiliki kelompok pengelola, dan wilayahnya sudah dikunjungi banyak wisatawan.

4. Tahap mandiri

Pada tahap ini desa wisata memiliki inovasi pariwisata dari masyarakat, destinasi wisata diakui dunia, sarana dan prasarana memiliki standar, serta pengelolaannya bersifat kolaboratif pentahelix (kolaborasi antara pihak pemerintah, pelaku bisnis pariwisata, komunitas, akademisi, dan media).

D. Pokdariws (Kelompok Sadar Wisata)

Salah satu aspek mendasar bagi keberhasilan pembangunan kepariwisataan adalah dapat diciptakannya lingkungan dan suasana kondusif yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat. Iklim atau lingkungan kondusif tersebut terutama dikaitkan dengan perwujudan Sadar Wisata

²⁰Masterplandes.com, ‘apa saja tahapan pengembangan Desa Wisata’, 28 februari 2023 .https://www.masterplandes.com/wisata/apa-saja-tahapan-pengembangan-desa_wisata/#:~:text=Pengembangan%20 Desa%20Wisata %20memilik i%20tujuan,dan 20tradisi%20kehidupan%20masyarakat%20desa. [Diakses, 26 September 2023]

dan Saptapesona yang dikembangkan secara konsisten di kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi pariwisata.²¹

Sadar Wisata dalam hal ini digambarkan sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam 2 (dua) hal berikut, yaitu:

1. Masyarakat menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah (host) yang baik bagi tamu atau wisatawan yang berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif sebagaimana tertuang dalam slogan Sapta Pesona.
2. Masyarakat menyadari hak dan kebutuhannya untuk menjadi pelaku wisata atau wisatawan untuk melakukan perjalanan ke suatu daerah tujuan wisata, sebagai wujud kebutuhan dasar untuk berekreasi maupun khususnya dalam mengenal dan mencintai tanah air.

Pokdarwis merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang berasal dari masyarakat yang tentunya memiliki peran strategis dalam mengembangkan serta mengelola potensi kekayaan alam dan budaya yang dimiliki suatu daerah untuk menjadi daerah tujuan wisata. Peran dari Pokdarwis adalah sebagai penggerak sadar wisata dan Sapta Pesona di lingkungan daerah wisata, untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata, dan mensukseskan pembangunan pariwisata. Maka dari itu dengan adanya Pokdarwis di suatu daerah tentunya dapat mendorong dalam membangun, mengembangkan dan memajukan kepariwisataan dan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Pokdarwis adalah kelompok yang bergerak secara swadaya artinya pengembangan kepariwisataan yang dilakukan di desa itu bersumber dari kekuatan desa sendiri dengan segala potensinya. Pokdarwis juga harus membangun dirinya secara swakarsa alias menciptakan pengembangan berdasar potensi kreativitas yang mereka miliki karena mereka yang memiliki kuasa atas pengembangan desa dengan segala sumber daya yang mereka miliki.

²¹ Syahrul Karim, Bambang Jati Kusuma, Nur Amalia, ‘Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Kepariwisataan Balikpapan: Kelompok Sadar Wisata’, Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, 13.3 (2017), 144-155, (hal.148)

Umumnya kelompok sadar wisata dikenal dengan sebutan Pokdarwis yang banyak terdapat pada desa-desa. Biasanya kelompok ini akan terbentuk bila sebuah desa memiliki potensi pariwisata. Dari sinilah kelompok ini akan memikirkan pengembangan dan strategi wisata yang cocok untuk desa. Tentunya bukan hanya melibatkan Pokdarwis saja seluruh elemen masyarakat pada desa juga akan ikut dalam pembangunan sektor pariwisata. Karena semua hal yang dilakukan untuk pembangunan pariwisata desa merupakan tanggung jawab bersama. Mengapa demikian? Karena hasil yang didapatkan dari adanya pariwisata di desa untuk memajukan kesejahteraan dan ekonomi seluruh masyarakat.

Lembaga yang bertanggung jawab dalam perintisan pengembangan desa wisata telah dibentuk secara baik dan diberi nama Pokdarwis Widesu. Lembaga yang sudah terbentuk ini dimaksimalkan peran dan fungsinya. Masyarakat yang ditunjuk sebagai pengurus telah memiliki komitmen dalam proses pengembangan desa wisata. Selain itu, lembaga yang telah dibentuk akan melaporkan kemajuan kerja, pemantauan dan evaluasi, termasuk juga membuat laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui musyawarah agar tidak terjadi konflik sosial antar anggota. Secara umum fungsi pokdarwis telah ditetapkan adalah sebagai penggerak sadar wisata dan Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan) di kawasan desa wisata. Selain itu, pokdarwis nantinya berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan dan mengembangkan sadar wisata di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Jadi, hadirnya Pokdarwis hanya ikut turut membantu dan memiliki peran penting dalam menggerakkan masyarakat desa dalam pembangunan sektor pariwisata. Sehingga berbagai hasil yang didapatkan saling menguntungkan satu sama lain. Bukan hanya menguntungkan satu kelompok atau masyarakat tertentu. Ini juga yang menjadi cara diliput media untuk mengenalkan sektor pariwisata yang dimiliki.

Ada beberapa peran yang menjadi pembeda antara Pokdarwis dengan kelompok masyarakat desa lainnya yaitu,

1. Peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan.

2. Peningkatan kemampuan dan keterampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya.
3. Mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di daerahnya.
4. Mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan Sapta Pesona.
5. Mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi pariwisata kepada wisatawan dan masyarakat setempat.

Untuk membentuk kelompok sadar wisata ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar dalam pembentukan kelompok ini sesuai dengan prosedur yang ada. Walaupun hanya merupakan kelompok yang terdiri dari masyarakat desa, bukan berarti pembentukannya dilakukan begitu saja.

Ada hal-hal yang harus dapat dipenuhi terutama syaratnya sehingga dapat membentuk kelompok Pokdarwis. Jika syarat-syarat telah terpenuhi maka, pembentukan Pokdarwis dapat dilakukan, untuk melakukannya pun ada caranya.

Syarat-syarat Pokdarwis yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.

1. Harus dilandaskan oleh sifat sukarela.
2. Memiliki dedikasi dan komitmen dengan bersungguh-sungguh dalam pengembangan kepariwisataan yang ada di desa.
3. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap pariwisata sebagai anggotanya.
4. Mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan, baik langsung maupun tidak langsung.
5. Jumlah anggota kelompok Pokdarwis, minimal 15 orang.

BAB III

PELAKSANAAN PKM

Adapun tahap-tahap pengabdian masyarakat ini yaitu ;

a. Discovery (Identifikasi Aset)

Beberapa aset yang dimiliki oleh Desa Surau yaitu :

1. Aset manusia yang terdiri dari : Masyarakat, Kelompok sadar wisata (Pokdarwis), Karang Taruna
2. Aset alam yang terdiri dari : Air Terjun 7 bayang, Danau Biru, Air Panas, Lubuk V
3. Aset infrastruktur yang terdiri dari : Jalan



b. Dream (Membangun Hubungan Dan Kolaborasi)

Membangun hubungan dan kolaborasi sangat penting dalam pengabdian masyarakat karena keberhasilan program sangat bergantung pada partisipasi aktif dan dukungan masyarakat setempat. Hubungan yang baik menciptakan kepercayaan, sehingga masyarakat lebih terbuka untuk menerima dan berkontribusi dalam program. Kolaborasi memungkinkan terjadinya sinergi antara berbagai pihak, seperti masyarakat lokal, pemerintah, sejarawan, dan organisasi lain, untuk memanfaatkan sumber daya dan keahlian secara maksimal.

c. Desain (Merancang target)

Adapun hasil dari diskusi ada beberapa target yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu :

1. Membuat pelatihan untuk pokdarwis dan karang taruna

Pembuatan pelatihan untuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Karang Taruna sangat penting dalam pengembangan desa wisata karena kedua kelompok ini merupakan motor penggerak yang akan mengelola dan memajukan sektor pariwisata di desa. Pelatihan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari kedua kelompok ini, dengan tujuan meningkatkan kapasitas mereka dalam berbagai aspek pengelolaan wisata.

Bagi Pokdarwis, pelatihan dapat mencakup materi seperti manajemen destinasi wisata, panduan wisata, pemasaran digital, serta pemeliharaan fasilitas wisata agar tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sedangkan untuk Karang Taruna, pelatihan dapat difokuskan pada pengembangan kewirausahaan, pembuatan produk lokal khas desa, serta strategi promosi untuk menarik pengunjung. Pelatihan ini juga perlu menyentuh aspek-aspek penting seperti pelayanan pelanggan, pengelolaan keuangan, dan bagaimana membangun kerjasama yang baik antar anggota dan dengan pihak luar.

Selain itu, kelompok kedua ini perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya kolaborasi dan kerja sama dalam menjalankan program pariwisata berbasis masyarakat, di mana mereka tidak hanya sebagai pengelola, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam memajukan desa wisata. Dengan pelatihan yang tepat, baik Pokdarwis maupun Karang Taruna akan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perkembangan industri pariwisata, meningkatkan daya saing desa wisata, serta memastikan manfaat ekonomi dan sosial yang bermanfaat.

2. Membuat akun sosial media Wisata Desa Surau

Membuat akun media sosial untuk wisata Desa Surau adalah langkah penting dalam memperkenalkan dan mempromosikan potensi wisata desa kepada khalayak luas. Di era digital ini, media sosial merupakan

alat yang sangat efektif untuk menjangkau calon wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah. Akun media sosial yang dikelola dengan baik dapat menjadi wadah untuk menampilkan keindahan alam, budaya, dan keunikan yang dimiliki oleh desa, serta memberikan informasi yang dibutuhkan wisatawan, seperti tempat wisata, acara, dan fasilitas yang tersedia.

Dalam proses pembuatan akun, sangat penting untuk menentukan platform yang tepat sesuai dengan target pasar, seperti Instagram untuk visualisasi foto dan video, Facebook untuk interaksi komunitas, atau TikTok untuk konten kreatif yang menarik perhatian generasi muda. Selain itu, akun media sosial desa harus konsisten dalam memperbarui konten, seperti berbagi cerita tentang tradisi lokal, kegiatan komunitas, dan testimoni wisatawan yang pernah berkunjung. Konten yang menarik dan informatif akan meningkatkan engagement, membangun citra positif desa sebagai destinasi wisata, serta memperluas jaringan pemasaran melalui media sosial.

Dokumentasi Kegiatan:



Daftar Pustaka

Agus Afandi, ‘Modul Participatory Action Research.’ (Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2014). h. 309-324.

Atim Rinawati, ‘Implementasi Model Asset Based Community Development (ABCD) dalam Pendampingan Pemenuhan Kompetensi Leadership Pengurus MWC NU Adimulyo’, Ar-Riqliyah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam, 7.1 (2022), 2809-5693 (h.5)

Antara, M., & Arida, N. S. 2015. Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal. (Konsorium Riset Pariwisata Universitas Udayana, 23). Diakses di https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir

Dadan Mukshin,’ Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung (Studi Kasus Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya)’, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 14.1, 1-14, (h.2)

Hendra Felani , Teddy Surya Rahmadi, ‘Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat di Lokasi Wisata Pantai Jakat Kota Bengkulu’, Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 14.1 (2022) 21-35 (h.22)

Herry Novrianda, Aan Shar, ‘Analisis Citra Destinasi Pariwisata di Provinsi Bengkulu’, Derivatif : Jurnal Manajemen, 16.2 (2022), 299-306 (h.300)

Deddy Prasetya Maha Rani, ‘Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang)’ Jurnal Politik Muda, 3.3, (2014), 412-421(hal. 415)

Kusuma Wardhani Masudah, Zainal Abidin Achmad, Widiana KhurniaPermatasari, Devita Andriani,Anugrah Akbar Fitra Putra Adianti,Hasri Maghfirotun Nisa, ‘Efektivitas Komunikasi Penyuluhan Pengembangan Desa Wisata Melalui Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Berbasis Sapta Pesona’ 1.2, (2022) 145-151 (hal.145)

Ade Jafar Sidiq, Risna Resnawaty, ‘Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggarjatu Kuningan, Jawa Barat’ PROSIDING KS: RISET & PKM, 4.1,1-140, (hal. 39)

Priasukmana, Soetarso dan R. Mohammad Mulyadin, ’ Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah, Info Sosial Ekonomi. 2001; 2 (1) : 37-44

Made Heny Urmila Dewi, chafid fandeli, M. Baiquni, ‘Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali, 3.2,(213), 117-226, (hal. 132)

Ni Gusti Ayu Susrami Dewi,’ Paket Wisata Pedesaan “Become Pangsanian”di Desa Wisata Pangsan, Petang, Bandung’, Analisis Pariwisata,16.1 (2016), 35-519 (h.31)

Itah Masitah, ‘Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran’, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 6.3,(2019), 2614-2945 (hal.46)

Wisma soerdomaji, abdul wahid, ‘Pendampinan Pengembangan Wisata Desa Belarang kecamatan tutur kabupaten Pasuruan, 1.2 (2021), 72-78, (hal. 73)

Nurhayati Darubekti, Sri Handayani Hanum , ‘Partisipan dan Pengembangan Desa Surau sebagai Desa Wisata untuk peningkatan kapasitas daya saing lokal dalam aktivitas perekonomian’, Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI (2022),155-160 (h..159)

Nugroho SBM, ‘Beberapa Masalah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia’, Pariwisata,7.2,(2020), 2355-6587, (h.125)

Priasukmana, Soetarso dan R. Mohammad Mulyadin, ’ Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah, Info Sosial Ekonomi. 2001; 2(1): 37-44.

Sri Handayani Hanum, Nurhayati Darubekti, Hajar G. Pramudyasmono, Panji Suminar ,Sumarto Widiono, ‘Pengembangan Desa Surau Sebagai Desa Wisata Berkelanjutan’, jurmas Sosial dan Humaniora, 3.3 (2022), 442-446 (h.443)

Syahrul Karim, Bambang Jati Kusuma, Nur Amalia, ‘Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Kepariwisataan Balikpapan: Kelompok Sadar Wisata’, Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, 13.3 (2017), 144-155, (hal.148)

Suwendi, ABD. Basir, jarot wahyudi, Metodologi Pengabdian Masyarakat, Edisi 1 (jakarta : Direktorat Pendidikan Tinggi keislaman Direktor Jendral pendidikan Islam Kementerian RI, 2022), h, 225

Nadhir Salahudin et al., Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Christoper Dereau, ‘Pembaru dan Kekuatan Lokal untuk Pembangunan’, (Australia: Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II, 2013), h.3

Kesi Widjajanti, “Model Pemberdayaan Masyarakat,” Ekonomi Pembangunan12, no. 1 (2011): 15–27.